

**Judul** : Polri Berkukuh Lanjutkan Tim Transformasi  
**Tanggal** : Jumat, 26 September 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Polri Berkukuh Lanjutkan Tim Transformasi

Kapolri mengundang 31 pakar dan akademisi lintas bidang untuk dimintai pandangan dan masukan guna reformasi kepolisian. Kini, Polri juga tengah memetakan persoalan internal untuk segera dibenahi.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI atau Polri berkukuh melanjutkan Tim Transformasi Reformasi internal dengan alasan ingin memenuhi harapan publik sekaligus mendukung Komite Reformasi Kepolisian dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Selain memetakan masalah, Polri juga mulai menjangkau masukan dari para pakar dan akademisi lintas bidang agar reformasi di Korps Bhayangkara itu berjalan optimal.

Presiden Prabowo telah merancang pembentukan Komite Reformasi Polri setelah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertahanan Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, 17 September lalu. Pihak Istana juga sudah mengajak sejumlah tokoh dan negarawan untuk bergabung. Keputusan presiden (keppres) terkait pembentukan Komite Reformasi Polri ini akan diterbitkan setelah Presiden kembali dari lawatannya ke luar negeri.

Namun, sebelum komite reformasi terbentuk, Polri sudah lebih dulu membentuk Tim Transformasi dan Reformasi Kepolisian. Pada 17 September, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pembentukan tim itu melalui surat perintah bernomor Sp/17/IX/TUK.2.1/2025.

Melalui surat itu pula, Kapolri menunjuk Kepala Lembaga Diklat Polri Komisaris Jenderal Chryshnanda Dwilaksana sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri.

Bukan hanya itu, tim ini bahkan sudah mulai meminta pandangan dan masukan publik terkait reformasi kepolisian. Pada Rabu (24/9/2025), Kapolri mengundang 31 pakar dan akademisi dari eksternal kepolisian untuk menjangkau masukan terkait reformasi Polri.

Pertemuan yang digelar di ruang Pusat Pengendalian Krisis Mabes Polri itu disebut sebagai rapat akselerasi transformasi



Defile personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upacara Hari Bhayangkara ke-79 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

si Polri. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolri itu merupakan tindak lanjut dari pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri.

Saat memberikan keterangan pers, Kamis (25/9), Listyo menjelaskan, Polri menggandeng 31 pakar dan akademisi lintas bidang sebagai tim akselerasi. Adapun pertemuan digelar sebagai sarana untuk menyerap saran dan kritik dari berbagai pihak agar proses reformasi internal kepolisian berjalan optimal.

Para tokoh yang diundang diminta memberikan masukan, saran, dan kritik agar perspektif

publik bisa diserap oleh tim reformasi internal Polri. Semua masukan akan dikaji serius oleh tim internal Polri.

"Yang jelas, polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi," ujar Listyo.

### Bukan tim tandingan

Dalam rapat akselerasi itu, Kapolri menjelaskan bahwa tim tersebut bukan tandingan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden. Tim internal Polri disebutnya sebagai salah satu bentuk respons cepat terhadap kebijakan Presiden untuk mereformasi kepolisian.

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri hadir untuk mendukung komite yang akan dibentuk Presiden. Tim itu akan melakukan pemetaan masalah di internal Polri yang nantinya dibutuhkan oleh Komite Reformasi Polri.

"Pada saatnya kami di sini ingin memenuhi harapan publik dan melakukan upaya untuk menjemput bola. Tim akselerasi ini bergerak bersama melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi," tuturnya.

Sejumlah pakar yang diminta memberikan masukan di antara

ranya adalah pemerhati kepolisian, Hermawan Sulistyono dan Bambang Rukminanto. Selain itu, Rustika Herlambang, Alfito Denny Ginting, serta Devie Rahmawati untuk bidang media dan komunikasi. Ada pula Hendardi, Poengky Indarti, Johan Budi Sapto Priowono, dan Adrianus Eliasta Sembiring Meliala untuk bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminanto, mengungkapkan, sebagian besar tokoh yang diundang merupakan penasihat ahli Kapolri. Karena itu, ia mengingatkan

agar tim internal itu bukan formalitas, sekadar untuk menjawab dinamika sosial politik saat ini.

Selain itu, Bambang juga menyampaikan agar reformasi kepolisian dijalankan bukan untuk mengembalikan Polri di bawah TNI seperti masa lalu. Lebih dari itu, reformasi hendaknya dilakukan untuk mendorong institusi Polri semakin profesional, independen, dan akuntabel.

Sementara secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsim, menilai, Tim Transformasi Reformasi Polri dibentuk seba-

gai wujud komitmen institusi tersebut untuk mereformasi diri. Menurut dia, tim internal Polri itu tidak akan bertabrakan dengan Komite Reformasi Polri yang nantinya dibentuk oleh Presiden.

"Teknisnya, kan, tim internal Polri bisa mempersiapkan dirinya untuk memberikan dukungan terhadap tim yang dibentuk Presiden. Jadi, ya, itu tidak masalah. Polri sendiri berkedudukan di bawah Presiden. Jadi, ketika tim reformasi dibentuk Presiden, Polri sudah pasti harus mengikutinya," paparnya.

### Revisi UU Polri

Seiring dengan pembentukan tim reformasi kepolisian oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pemerintah dan DPR telah sepakat memasukkan revisi UU Polri sebagai RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengingatkan para pembentuk undang-undang untuk berhati-hati menanggapi wacana reformasi kepolisian. Pembentuk undang-undang harus melibatkan partisipasi publik bermakna, baik dalam perumusan maupun pembahasan RUU Polri.

"Pembahasan RUU jangan sampai tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan seterusnya. Apalagi, draf RUU yang dibuat sebelumnya cenderung memperluas kewenangan Polri," tuturnya.

Salah satu usulan tambahan kewenangan yang disoroti adalah pengawasan ruang siber. Tidak hanya bisa melakukan penyadapan, Polri juga bisa memblokir hingga memutus jaringan internet. Usul tambahan kewenangan semacam itu harus menurut Usman harus dibahas dengan hati-hati. (NAD/RTG)